

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang dapat dijelaskan dan diterapkan oleh perusahaan dalam mengelola operasinya. (Jensen & Meckling, 1976) menyarankan bahwa teori keagenan menentukan hubungan keagenan timbul ketika satu atau lebih orang (pemilik) mempekerjakan orang lain (agen) memberikan layanan, kemudian mendelegasikan kekuatan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu perusahaan, pemilik atau pemegang saham (principal) dari sumber daya ekonomi memberikan wewenang atau tanggungjawab kepada manajemen (agent) untuk menjalankan perusahaan tersebut dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Para pemegang saham (principal) menginginkan pengembalian yang tinggi atas investasi mereka di perusahaan, tetapi manajemen (agent) selalu ingin menerima pendapatan atau penghargaan yang tinggi atas dedikasi dan pekerjaan yang telah mereka lakukan untuk perusahaan.

(Dewayanto, 2017) beranggapan bahwa prinsipal dan agen sebagai pelaku ekonomi adalah rasional, memiliki kepentingan sendiri, dan bertindak untuk kepentingannya sendiri. Prinsipal diharapkan hanya tertarik pada peningkatan keuntungan finansial atau investasi pada perusahaan. Agen diharapkan menerima kepuasan dalam bentuk kompensasi finansial dan persyaratan yang terkait dengan hubungan tersebut. Karena manajemen dan investor/kreditor merupakan pihak yang berbeda, maka hubungan keduanya dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, sehingga terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih dapat mengontrol informasi dikhawatirkan akan terjadi (Suwardjono, 2011). Laporan keuangan yang diaudit yang membutuhkan pihak independen, auditor, untuk menjembatani perbedaan kepentingan atau menghindari asimetri informasi antara prinsipal dan agen, dan auditor menjadi dasar pengambilan keputusan lebih lanjut.

Asimetri informasi adalah salah satu penyebab masalah keagenan. (Arrow, 1985) mengklasifikasikan masalah keagenan sebagai moral hazard. Ini adalah keadaan di mana pemegang saham sebagai prinsipal tidak dapat mengamati secara rinci apakah manajemen sebagai agen telah membuat keputusan yang tepat, dan seleksi negatif adalah keadaan di mana agen melakukan pengamatan yang tidak dilakukan oleh prinsipal. Pengamatan yang dilakukan digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, prinsipal tidak dapat memastikan bahwa informasi dari pengamatan agen akan digunakan dengan benar untuk membuat keputusan yang tepat dan akan menguntungkan principal

(Jensen & Meckling, 1976) menemukan bahwa ada biaya keagenan yang ditanggung oleh prinsipal dan agen dalam upaya mengatasi atau mengurangi konflik keagenan. Upaya mediasi merupakan penjumlahan dari biaya pengawasan pemegang saham/investor (prinsipal). Artinya, ia mengukur, memantau, mengendalikan perilaku manajemen dan menjamin biaya (bounding). Biaya agensi tersebut merupakan jumlah dari biaya pengawasan (monitoring expenditure) yang dikeluarkan oleh manajemen (*agent*) untuk memastikan bahwa manajemen bertindak untuk kepentingan principal, dan residual cost yakni pengorbanan berupa penurunan tingkat kepuasan principal karena adanya perbedaan keputusan yang dibuat oleh *agent* maupun principal dalam hubungan agensi.

Penelitian ini berkaitan dengan teori keagenan karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dan *agent*. Untuk memverifikasi laporan keuangan saham yang diterbitkan oleh investor (kebijakan) secara menguntungkan, perlu untuk mengaudit lebih lanjut laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen (*agent*). Dalam pemeriksaan dibutuhkan tenaga ahli dari pihak independen yakni auditor. Audit membutuhkan seorang ahli independen, seorang auditor menyelesaikan proses lama atau cepat dalam pengambilan keputusan audit (*Audit Report Lag*) merupakan salah satu cara untuk mengurangi timbulnya asimetri informasi.

Variabel komite audit dalam penelitian ini tergantung pada masalah yang mungkin muncul karena perbedaan/benturan kepentingan oleh para pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Komite audit yang ada

diperusahaan dibentuk dengan tujuan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) karena adanya pengawasan dan pengevaluasian kinerja manajemen sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh investor (*principal*).

Selain itu, variabel afiliasi KAP dalam penelitian ini juga berhubungan dengan hipotesis keagenan dimana laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen (*agent*) terbukti benar untuk menjamin keistimewaan investor/pemegang saham (*principal*) untuk secara spesifik mendapatkan profit atas investasinya, khususnya dengan KAP dimana perusahaan berafiliasi karena ketika perusahaan berafiliasi dengan KAP yang baik (bereputasi) dapat menjamin bahwa laporan keuangan dapat diaudit dengan baik atau memberikan informasi yang sebenarnya.

2.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal adalah teori yang mengungkapkan bahwa informasi yang didapat oleh masing-masing bagian tidak sama dengan asumsi dasar. Dengan kata lain, teori sinyal berkaitan dengan asimetri informasi. Sinyal adalah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana perusahaan memandang prospek perusahaan (Brigham & Houston, 2019, p. 33). Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh (Spence, 1973) yang dijelaskan dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling yang mendefinisikan signaling sebagai upaya untuk memberikan informasi untuk menggambarkan masalah secara akurat kepada pihak lain sehingga pihak lain bersedia untuk berinvestasi bahkan di bawah ketidakpastian. Teori sinyal yang digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan keuangan digunakan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal positif atau negatif kepada penggunanya. Informasi akuntansi merupakan sinyal yang digunakan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, laporan tentang apa yang telah dilakukan manajemen untuk mewujudkan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Sinyal yang diberikan dapat mempengaruhi

harga saham suatu perusahaan, sehingga investor memiliki kaitan yang erat dengan laporan keuangan dimana laporan keuangan tersebut digunakan oleh para investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan ke publik merupakan sinyal baik dari perusahaan yang memberikan informasi positif yang berguna bagi para investor. Semakin lama *Audit Report Lag* menyebabkan informasi menjadi kurang berguna dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan informasi tersebut keilangan sifat relevan. Hal ini membuat penyebar informasi tidak merata sehingga ada pelaku pasar yang menerima informasi tepat waktu dan ada yang menerima informasi terlambat atau hingga tidak menerima informasi. Keadaan seperti ini yang disebut dengan informasi yang tidak simetri (*information asymmetric*). Hal itu yang bisa terjadi jika *Audit Report Lag* yang terjadi semakin lama (Ratnasari & Ardianti, 2016).

Ukuran perusahaan juga digunakan oleh manajemen sebagai sinyal untuk meningkatkan kepercayaan pihak lain terutama investor terhadap perusahaan. Ukuran perusahaan besar lebih penting daripada perusahaan kecil. Untuk variabel umum perusahaan, teori signaling menjadi dasar dari penelitian ini, karena umur perusahaan dapat dijadikan sebagai sinyal untuk melaporkan pemakai kepada perusahaan untuk memberikan instruksi. Usia perusahaan besar dapat menjadi pesan atau sinyal yang baik jika perusahaan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam proses industrinya, sebaliknya usia perusahaan kecil dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk bertahan dalam dunia industri. tidak dapat dikenali Atau tidak dapat dipercaya bagaimana memercayai perusahaan yang sudah lama berdiri.

2.1.3 Laporan Keuangan

Tanggung jawab manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya dilaporkan dalam laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder), seperti pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (tax agencies), kreditur (Bank atau

Lembaga Keuangan), atau pihak berkepentingan lainnya (Rahardjo, 2007, p. 53).

"Laporan kemudian dibuat untuk pengguna setelah transaksi dicatat dan diringkas. Laporan Keuangan adalah dokumen akuntansi yang memuat data ini" (Warren 2009: 22). Laporan keuangan, yang meliputi neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba rugi, dan laporan posisi keuangan, dapat digunakan sebagai alat untuk melihat masalah kesehatan perusahaan. Laporan keuangan sangat membantu untuk membuat keputusan dan memainkan peran penting dalam mengukur dan mengevaluasi keberhasilan organisasi (Lianto & Kusuma, 2010).

Laporan keuangan adalah penyajian sistematis status keuangan dan kinerja keuangan suatu usaha atau entitas, menurut PSAK No. 1 (IAI, 2009). Hasil akuntabilitas manajemen untuk penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka ditampilkan dalam laporan keuangan. Manajemen entitas bertanggung jawab atas pembuatan dan penyajian laporan keuangan, dan substansinya menunjukkan semua komponen laporan keuangan secara keseluruhan dengan manfaat yang sama. Data dari akun keuangan mencakup aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, keuntungan, kerugian, dan kontribusi pemilik. Laporan keuangan perusahaan harus memenuhi empat persyaratan kualitatif: relevansi, pemahaman, komparabilitas, dan keandalan. Persyaratan ini sangat penting untuk kegunaan informasi laporan keuangan bagi pengguna.

Investor di pasar modal menggunakan informasi akuntansi laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi tentang jenis investasi yang harus mereka lakukan (Harahap, 2011, pp. 127-128). Menurut Pernyataan APB No. 4, "Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement Business Enterprises", tujuan kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a) **Relevance**

Memilih informasi yang akurat dan sesuai untuk mendukung pengambilan keputusan pengguna laporan.

- b) Understandability
Informasi yang dipilih untuk presentasi tidak hanya harus signifikan tetapi dapat dimengerti oleh pemakainya.
- c) Verifiability
Pihak lain yang akan memberikan pandangan harus dapat memverifikasi hasil akuntansi tersebut.
- d) Neutrality
Laporan akuntansi tidak memihak bagi mereka yang berkepentingan. Informasi ditujukan untuk semua orang, bukan hanya kelompok tertentu.
- e) Timeliness
Hanya ketika laporan keuangan disampaikan pada waktu yang tepat maka akan berguna untuk pengambilan keputusan.
- f) Comparability
Informasi keuangan harus saling berkomparasi, yang berarti harus memahami standar yang sama untuk setiap perusahaan.
- g) Completeness
Informasi akuntansi yang dilaporkan harus memenuhi semua kebutuhan pengguna yang praktis.

Salah satu hambatan untuk memperoleh informasi yang relevan adalah ketepatan waktu. Informasi yang dihasilkan pada waktu yang tidak tepat kehilangan kegunaannya karena tidak disajikan kepada pengguna atau kehilangan relevansinya ketika keputusan diperlukan. Keuntungan lebih lanjut akan diperoleh dari ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan, yang didefinisikan sebagai waktu yang lebih singkat antara tanggal penutupan buku dan tanggal laporan tahunan yang diaudit oleh auditor independen. Namun keinginan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu seringkali menemui kendala. Salah satu kendala yang muncul adalah laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang komprehensif bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepada manajemen oleh pemilik perusahaan agar harus disajikan secara wajar. Laporan keuangan juga

mencerminkan semua transaksi bisnis dari waktu ke waktu yang menghasilkan peningkatan dan penurunan nilai ekonomi bersih bagi pemilik modal. Berikut ini adalah tujuan laporan keuangan, sebagaimana dinyatakan oleh PSAK No.1 ((IAI), 2009) :

- a. Memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja, dan perubahan posisi yang bermanfaat membantu sejumlah besar pengambil keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi :

- 1) Aset
- 2) Kewajiban
- 3) Ekuitas
- 4) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- 5) Arus Kas

Karakteristik laporan keuangan adalah ciri-ciri informasi akuntansi yang cenderung untuk menambahkan manfaatnya. Karakteristik kualitatif menurut laporan keuangan, yaitu:

- 1) Dapat dipahami
- 2) Relevan
- 3) Materialitas
- 4) Kenadalan
- 5) Penyajian Jujur
- 6) Substansi Mengungguli Bentuk
- 7) Netralitas
- 8) Pertimbangan sehat

- 9) Kelengkapan
- 10) Dapat dipeerbandingkan

2.1.4 Auditing

2.2.4.1. Definisi Auditing

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014, p. 9).

Auditing bagi perusahaan merupakan hal yang penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan suatu perusahaan, seperti mengetahui apakah suatu perusahaan mengalami *Audit Report Lag* atau tidak. Selain itu, auditing juga berpengaruh terhadap Kantor Akuntan Publik yang dipilih oleh perusahaan dan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena jika perusahaan yang diaudit ternyata mengalami kerugian maka kinerja perusahaan tersebut akan menurun.

2.2.4.2. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Asersi dari Audit Laporan Keuangan ini merupakan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Bukti audit yang tersedia dapat berupa dokumen, catatan dan bahan bukti yang berasal dari sumber-sumber diluar perusahaan. Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah Dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Perusahaan semakin kompleks, auditor tidak cukup hanya berfokus pada transaksi-transaksi akuntansi. Auditor harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam yang mencakup pengetahuan tentang industri klien, lingkungan peraturan dan operasinya serta hubungan eksternal perusahaan. Auditor juga mempertimbangkan strategi dan proses bisnis klien serta faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan strategis itu. Analisis ini akan membantu auditor mengidentifikasi risiko-risiko dengan strategis yang mungkin mempengaruhi apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Audit laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan yang ikut dalam pasar modal.

2.1.5 Kajian Variabel Penelitian

2.1.5.1 Audit Report Lag

Isu keterlambatan pelaporan audit telah terjadi di Australia sejak tahun 1975 dan ditandai dengan penelitian oleh Dyer dan McHugh (Nufita, 2017). *Audit Report Lag* (ARL) adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan perusahaan dari akhir tahun buku sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Menurut (Dyer & McHugh, 1975) *Audit Report Lag* adalah selang waktu antara akhir tahun buku dan tanggal laporan audit dalam laporan keuangan. (Sugiman, 2016) menyatakan bahwa *Audit Report Lag* menunjukkan lamanya penyelesaian audit, tujuan keseluruhan dari audit adalah untuk mengomentari apakah laporan klien disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai contoh, dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Inggris, Amerika Serikat, Cina, Malaysia, dan negara lainnya, Hashim (Nufita, 2017) adalah :

1. Ukuran perusahaan, profitabilitas, tahun buku perusahaan, leverage, perusahaan terdaftar dan tidak terdaftar, pengendalian internal, sistem dan teknologi informasi, ruang lingkup pekerjaan audit setelah tahun buku (busy season), opini audit, karakteristik auditor, kompensasi

auditor, pendapatan auditor, laba rugi, posisi keuangan, pos khusus, jumlah anak perusahaan, jenis industri, dan jenis informasi yang akan disampaikan.

2. Tata kelola (good governance), meliputi kinerja perusahaan yang sangat baik, kualitas pelaporan keuangan, kegagalan perusahaan, kualitas audit, komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, direktur non-eksekutif, dualitas CEO, kompleksitas perusahaan, manajemen risiko, pelaporan lingkungan (environmental), dan manajemen laba.

(Givolvy & Palmon, 1982) mengemukakan bahwa *Audit Report Lag* terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi isi dan relevansi informasi dan waktu pengumuman laba (timing of earnings announcement) yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mengurangi keterlambatan pelaporan (reporting lag). Dyer & McHugh (1975) mengklasifikasikan keterlambatan atau lag menjadi:

- 1) Auditor's report lag adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penandatanganan laporan audit.
- 2) Reporting lag yakni interval jumlah hari antara penandatanganan laporan audit dan publikasi tanggal pelaporan oleh bursa.
- 3) Total lag yakni interval jumlah hari terhitung sejak tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal diterimanya laporan yang diterbitkan oleh bursa.

2.1.5.2 Ukuran Perusahaan

Secara umum ukuran perusahaan dapat menjadi pedoman bagi investor untuk mengumpulkan informasi yang terdapat dalam perusahaan dan juga mencerminkan persepsi manajemen akan pentingnya informasi, baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Ukuran perusahaan juga menentukan tingkat kepercayaan investor, semakin besar perusahaan semakin dikenal masyarakat, yang berarti semakin mudah akses informasi yang meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, dalam hal ini ukuran perusahaan

dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. (Sugiman, 2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, dan sistem pengendalian internal yang lebih kuat, menyatakan bahwa hal itu menarik perhatian investor, regulator dan publik, yang memungkinkan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit lebih cepat sebagai regulator perusahaan. Bapepam selaku pihak pemberi aturan pada perusahaan mengeluarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/1997 yang mengklasifikasikan UKM sebagai badan hukum yang didirikan di Indonesia sebagai berikut:

1. Memiliki jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
2. Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil adalah Penawaran Umum sehubungan dengan Efek yang ditawarkan oleh Perusahaan Menengah atau Kecil, dimana nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

UU No. 20 Tahun 2008 juga mengklasifikasikan perusahaan sebagai. Beberapa klasifikasi, yaitu 4 (empat) kategori. Empat kategori yaitu usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Menjelaskan tentang setiap kategori yang diatur dalam UU No. 1. Pasal 1 (1) Nomor 20 Tahun 2008 adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha produktif mandiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau dikuasai. Merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar. Kekayaan bersih atau kinerja penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Perusahaan besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan komersial yang kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunannya lebih besar daripada perusahaan menengah (termasuk perusahaan milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing) yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan beberapa proksi, yaitu :

1. Total Aset

Jika total aset perusahaan lebih besar, dianggap telah mencapai kedewasaan dan perusahaan dianggap besar. Dengan aset besar perusahaan ini memiliki, arus kasnya positif, stabilitas jangka panjang, dan pendapatan. Keuntungan yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan total aset kecil.

2. Jumlah Karyawan

Karyawan merupakan salah satu pemangku kepentingan terpenting dalam perusahaan. Operasi perusahaan tidak dapat berfungsi tanpa karyawan. Akibatnya, banyak perusahaan yang berusaha keras untuk memberikan hak yang sesuai, meningkatkan keamanan kerja, dan meningkatkan kinerja karyawan. Jumlah karyawan sendiri merupakan penentu besar kecilnya suatu perusahaan. Jika jumlah karyawan suatu perusahaan besar, maka dapat digolongkan sebagai perusahaan besar dan sebaliknya jika jumlah karyawan sebuah perusahaan kecil, maka dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan kecil.

3. Total Penjualan

Besar kecilnya perusahaan juga tercermin dari aspek penjualan. Penjualan yang tinggi atau total penjualan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berhasil dalam bisnisnya. UU No.9 tahun tentang usaha kecil dalam poin b, menyatakan bahwa “Perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) digolongkan kelompok usaha kecil”. Dengan aturan tersebut, perusahaan dengan hasil penjualan diatas satu miliar dapat dikategorikan menjadi perusahaan menengah ataupun perusahaan besar.

Ukuran perusahaan merupakan acuan untuk melihat besar atau kecilnya suatu perusahaan. Biasanya, perusahaan besar dipawasi oleh investor, pengawas modal dan pemerintah, sehingga cenderung menyelesaikan audit laporan keuangan lebih cepat uuntuk meminimalkan adanya *Audit Report Lag* (Lisdara, Budianto, & Mulyadi, 2019). Ukuran perusahaan yang relatif besar menunjukkan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah keterlambatan laporan keuangan yang dalam penelitian ini adalah *Audit Report Lag* dengan asumsi bahwa perusahaan besar memiliki pengendalian yang baik secara sistematis memperbaiki berbagai masalah pada saat audit dilakukan. Dan sebaliknya, perusahaan kecil memiliki sistem pengendalian yang lemah menyebabkan auditor melakukan pemeriksaan yang lebih banyak saat melakukan audit yang akan memperlambat proses penyusunan laporan keuangan yang sudah diaudit. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan *Audit Report Lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang didukung oleh penelitian sebelumnya dari (Hassan, 2016) menemukan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Audit Report Lag*.

2.1.5.3 Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan salah satu objek yang diperhatikan dan dipertimbangkan oleh investor ketika berinvestasi pada suatu perusahaan. Umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan

akan tetap bertahan dan kompetitif sehingga umur perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Proyeksi digunakan untuk mengukur umur suatu perusahaan dengan cara menghitung jumlah umur atau tahun suatu perusahaan sejak listing di pasar modal sampai dengan penelitian. Semakin lama suatu perusahaan bertahan atau semakin tua usianya, semakin besar kemungkinannya akan memberikan informasi yang lebih banyak dan lebih luas tentang perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. Mengetahui umur suatu perusahaan juga menunjukkan seberapa lama perusahaan tersebut dapat bertahan dalam dunia bisnis. Semakin lama anda tau semakin tua umur perusahaan, semakin besar pengalaman bisnis perusahaan dan semakin baik perusahaan mengetahui tantangan dan kondisi dunia bisnis yang sebenarnya, sehingga kebijakan yang dibuat oleh perusahaan semakin baik sehingga optimal. Umur perusahaan dapat dihitung sejak perusahaan didirikan hingga saat ini. Undang-undang No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai berikut: “Perusahaan adalah segala bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dan berkesinambungan dengan tujuan mencari keuntungan dan/atau laba, baik yang berbentuk perorangan, maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia”. Oleh karena itu, umur suatu perusahaan adalah waktu yang dihitung sejak suatu perusahaan didirikan atau di bentuk yang bergerak dalam suatu bisnis dan memiliki tujuan yakni memperoleh laba atau keuntungan dan proses industrinya.

Hasil variabel umur perusahaan juga berbeda di antara beberapa penelitian. Pada penelitian (Widhiasari & Budiarta, 2016) umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*. Ini karena perusahaan yang sudah lama berdiri lebih besar dan membutuhkan waktu lebih lama bagi auditor untuk menyelesaikan proses audit. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Rizkyllah, 2018) yang diperluas dengan membuka cabang atau anak perusahaan diberbagai daerah atau di luar negeri, biasanya jika perusahaan itu sudah ada sejak lama. Besarnya

ruang lingkup pekerjaan serta kerumitan dan kompleksitas ruang lingkup bisnis memang mempengaruhi lama waktu yang dimiliki seorang auditor untuk melakukan proses audit di perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi lama waktu pelaporan audit yang tertunda. Berbeda dengan penelitian (Ansah, 2000) dan (Puspatama, 2014) Puspatama (2014) dimana umur perusahaan cenderung mempercepat proses audit, sehingga perusahaan memiliki kemampuan, pengalaman, dan kualifikasi untuk mengumpulkan data dalam laporan audit sehingga lebih sedikit sehingga *Audit Report Lag*nya akan semakin kecil karena perusahaan mampu dan berpengalaman serta terampil dalam mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi pada saat diperlukan sehingga auditor tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses auditnya.

2.1.5.4 Komite Audit

Komite audit adalah salah satu jenis komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang sifatnya fakultatif yaitu dapat dibentuk, bukan bersifat imperatif (keharusan). Sehingga yang berwenang sepenuhnya mengenai komite audit kepada kebijakan dan pertimbangan adalah Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau direksi tidak berwenang mencampuri pembentukannya karena benar-benar merupakan hak otonomi Dewan Komisaris. Karena kewenangan pembentukan komite audit ada di Dewan Komisaris, maka komite audit bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris.

Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit bertindak secara independen dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan

lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

- b) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit memiliki kewenangan untuk mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Komite Audit berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas serta tanggung jawab Komite Audit. Komite Audit dapat melibatkan pihak independen

di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya komite Audit juga dapat melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wandrianto, Anugerah, & Nurmayanti, 2021) menemukan bahwa keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *Audit Report Lag* sementara gender komite audit belum dapat berkontribusi untuk memengaruhi *Audit Report Lag* dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa agar dapat mempercepat pelaporan keuangan auditan diperlukan komite audit yang mempunyai keahlian keuangan, jumlah komite audit yang lebih banyak serta pertemuan komite audit yang lebih sering. Sementara tidak ada perbedaan dalam kecepatan pelaporan kuangan auditan dengan gender komite audit. Saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan sampel dengan cakupan yang lebih besar agar menghasilkan temuan yang lebih representatif, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chandra & Kellin, 2020) penelitian menyimpulkan ukuran komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif, sedangkan opini audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh (Ratnasari & Ardianti, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik komite audit dan prediksi kebangkrutan berpengaruh pada *Audit Report Lag* tetapi kepemilikan publik tidak berpengaruh pada audit repo lag.

2.1.5.5 Afiliasi KAP

Afiliasi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bisa berupa lembaga maupun perorangan yang masing-masing berdiri sendiri. Afiliasi juga bisa berupa keanggotaan atau cabang suatu lembaga yang kedudukannya masih di bawah lembaga induk namun masing-masing tetap berdiri sendiri. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan publik diwajibkan mempunyai Kantor Akuntan Publik (KAP) maksimal enam bulan sejak diberikan izin menjadi akuntan publik. Jika tidak segera memiliki KAP atau tidak segera bergabung dengan KAP dalam waktu enam bulan tersebut, izin akuntan publik akan dicabut.

Berdasarkan ukurannya, KAP digolongkan menjadi dua, yaitu KAP yang berafiliasi dengan big four dan KAP non big four. KAP big four memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan KAP non big four, seperti sumber daya dan tenaga-tenaga profesional (partner dan staff) yang jumlahnya lebih banyak, tenaga kerja kompeten dikarenakan seleksi yang ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan yang cukup banyak. Selain itu juga, klien yang dimiliki KAP big four jumlahnya beragam dan lebih banyak dibandingkan KAP non big four, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh auditor dalam bidang audit akan lebih banyak. Klien yang banyak juga menunjukkan bahwa KAP big four memiliki aset yang lebih besar untuk menunjang proses audit. KAP big four memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat, maka itu mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan audit untuk menjaga reputasi dan kinerja auditor yang diberikannya. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki KAP big four membantu auditornya dalam menjalankan proses audit yang lebih baik dan sesuai dengan SPAP sehingga auditor lebih mampu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran dalam laporan keuangan klien untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan SAK. Maka dari itu, KAP big four diyakini memberikan kinerja auditor yang tinggi.

Untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan, perusahaan merekrut auditor dari kantor akuntan publik terkemuka, yang juga memiliki reputasi yang baik (Lisdara, Budianto, & Mulyadi, 2019). Perusahaan berusaha untuk memilih KAP yang memiliki reputasi baik untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan salah satu penyedia jasa akuntan bagi tiap pihak yang membutuhkan. Sebuah KAP harus didirikan sesuai dengan

aturan yang berlaku yaitu undang-undang akuntan publik. Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan publik diwajibkan mempunyai Kantor Akuntan Publik (KAP) maksimal enam bulan sejak diberikannya izin menjadi akuntan publik (Nufita, 2017).

Akuntan publik merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan jasa bagi klien. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik yaitu:

- 1) Jasa attestasi, berupa jasa audit untuk laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan pro forma, jasa review atas laporan keuangan, dan jasa attestasi lainnya.
- 2) Jasa non-attestasi, berupa jasa-jasa yang diberikan baik dalam bidang akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi.

(Lisdara, Budianto, & Mulyadi, 2019) berpendapat bahwa sebuah kantor akuntan yang memenuhi kriteria ini terdiri dari kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar, yang secara universal diakui oleh Big Four perusahaan akuntansi di seluruh dunia. Perusahaan cenderung menyausun laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dan dapat dilaporkan kepada public secara tepat waktu. The Big Four adalah empat kantor akuntansi publik yang berskala internasional yang terbesar yang menangani sebagian besar audit bagi perusahaan, baik terbuka (public) maupun tertutup (private). Di Indonesia sendiri terdapat beberapa KAP yang berafiliasi dengan Big Four yakni:

- 1) KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, berafiliasi dengan Price Waterhouse Coopers.
- 2) KAP Osman Bing Satrio & Eny, berafiliasi dengan Deloitte.
- 3) KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berafiliasi dengan Ernst and Young.
- 4) KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berafiliasi dengan KPMG.

2.2 Review-Review Hasil Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu telah mengungkap faktor-faktor yang berpengaruh berbeda terhadap *Audit Report Lag* yang memiliki hasil berbeda-beda. beberapa diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan Hasan (2016) tentang *Determinants Of Audit Report Lag* (Adidence From Palestine) dengan menggunakan regresi linear berganda. Penelitian ini menemukan bahwa *Audit Report Lag* dipengaruhi oleh board size, status of audit firm, company complexity, existence of audit committee, dan ownership dispersion.

Penelitian yang dilakukan Sugiman (2016) tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Audit Report Lag* (Pada Perusahaan Sektor Perdagangan Jasa Dan Investasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) dengan analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*. Sementara faktor Likuiditas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*.

Penelitian yang dilakukan Lisdara, Budianto & Mulyadi (2019) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Perusahaan, Solvabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Report Lag* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017) dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, laba perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* dan solvabilitas tidak adanya pengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

Penelitian yang dilakukan Zulaecha & Suyatiningsih (2016) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Report Lag* (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Pada tahun 2011-2013) menggunakan analisis regresi linear berganda menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag* sedangkan ukuran kantor akuntan publik, umur perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Report Lag* sehingga

ROA, DEBT RATIO, KAP dan AGE secara simultan berpengaruh positif terhadap audit report lag.

Penelitian yang dilakukan Nurdianti, Kartika & Ani (2020) tentang Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Pergantian Auditor Terhadap *Audit Report Lag* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018) dengan analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil analisis umur perusahaan dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Report Lag* sedangkan pergantian auditor mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap *Audit Report Lag*.

Penelitian yang dilakukan Ariani (2018) tentang Pengaruh Ukuran dan Umur Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* Dengan Profitabilitas Dan Solvabilitas Sebagai Variabel Moderating dengan menggunakan moderated regression analysis (MRA) menyimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Report Lag*, umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*, profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Audit Report Lag*, solvabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Audit Report Lag* dan solvabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh umur perusahaan terhadap *Audit Report Lag*.

Penelitian yang dilakukan Widhiasari & Budiarta (2016) tentang Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan Pergantian Auditor Terhadap *Audit Report Lag* menggunakan analisis linear berganda menyimpulkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Report Lag*, ukuran perusahaan, reputasi auditor dan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

Penelitian yang dilakukan Wandrianto, Anugerah & Nurmayanti (2021) tentang Karakteristik Komite Audit Dan *Audit Report Lag* (Studi Empiris Di Indonesia) dengan menggunakan analisis regresi berganda hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *Audit Report Lag* sementara gender

komite audit belum dapat berkontribusi untuk memengaruhi *Audit Report Lag* dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa agar dapat mempercepat pelaporan keuangan auditan diperlukan komite audit yang mempunyai keahlian keuangan, jumlah komite audit yang lebih banyak serta pertemuan komite audit yang lebih sering. Sementara tidak ada perbedaan dalam kecepatan pelaporan keuangan auditan dengan gender komite audit. Saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan sampel dengan cakupan yang lebih besar agar menghasilkan temuan yang lebih representatif.

Penelitian yang dilakukan Aristika, Trisnawati & Handayani (2016) tentang Pengaruh Opini Audit, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan Laba Rugi terhadap *Audit Report Lag* menggunakan regresi linear berganda menyimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Audit Report Lag*, umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*, sedangkan untung dan rugi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Audit Report Lag*.

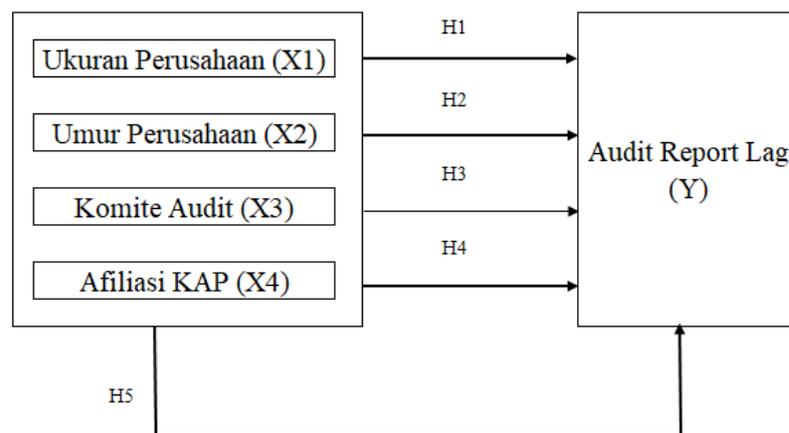
Penelitian yang dilakukan Michael & Rohman (2017) tentang audit tenure berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* dan peran spesialisasi industri auditor sebagai variabel menggunakan regresi linear berganda menyimpulkan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* dan peran spesialisasi industri auditor sebagai variabel pemoderasi memperlemah pengaruh negatif audit tenure terhadap *Audit Report Lag*. Afiliasi KAP tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag* dan spesialisasi industri auditor tidak memoderasi hubungan antara afiliasi KAP dan *Audit Report Lag*.

Penelitian yang dilakukan Ansah (2000) tentang ukuran perusahaan, profitabilitas, dan usia perusahaan sebagai penjelas yang signifikan secara statistik atas perbedaan ketepatan waktu laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan sampel menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan usia perusahaan sebagai penjelas yang signifikan secara statistik atas perbedaan ketepatan waktu laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan sampel.

Penelitian yang dilakukan Shofiyah & Suryani (2020) tentang *Audit Report Lag* and Its Determinants dengan menggunakan analisis regresi berganda hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Audit Report Lag*, tetapi solvabilitas dan reputasi KAP tidak berpengaruh.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (variabel terikat) berupa *Audit Report Lag*, sedangkan variabel independen (variabel bebas) adalah Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Komite Audit dan Afiliasi KAP. Dibawah ini adalah gambaran skema kerangka teori dari penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Ukuran perusahaan mempengaruhi *Audit Report Lag*. Perusahaan besar memiliki pengendalian dan sumber daya yang memadai sehingga mempercepat proses pengauditan selain itu perusahaan besar lebih diawasi oleh para pengguna laporan keuangan.

Umur perusahaan mempengaruhi *Audit Report Lag*. Perusahaan yang lama diyakini memiliki pengalaman lebih banyak serta trampil dalam mengunpulkan, memproses dan menghasilkan informasi sehingga auditor tidak membutuhkan waktu lama untuk mengaudit.

Komite audit mempengaruhi *Audit Report Lag*. Ketika jumlah komite audit semakin banyak, maka akan semakin banyak yang mengawasi keberlangsungan

audit sehingga laporan keuangan yang telah diaudit dapat diterbitkan dengan cepat dan kemungkinan terjadinya *Audit Report Lag* akan semakin kecil.

Kantor akuntan publik yang bekerja sama dengan KAP *Big Four* memiliki auditor dan karyawan yang banyak serta handal, sehingga dapat bekerja secara efisien dan mempercepat proses audit sehingga akan mengurangi keterlambatan laporan keuangan.

2.3.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori, kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dikembangkan kerangka berpikir penelitian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kerangka berpikir penelitian, yang menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

2.3.1.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag*

Ukuran perusahaan menurut (Sugiman, 2016) merupakan nilai dari beberapa segi, besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai nilai tersebut maka akan semakin besar ukuran perusahaan. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka akan semakin besar kesempatan untuk dikenal oleh masyarakat. (Dyer & McHugh, 1975), Carslaw dan Kaplan (1991) dan (Ansah, 2000) dalam penelitian mereka menemukan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan mempunyai hubungan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ukuran (proksi) yang mereka gunakan untuk variabel ukuran perusahaan ini adalah dengan total aset. Bukti empiris yang ada menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka berargumen bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem

informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik.

Ukuran perusahaan menjadi acuan untuk melihat seberapa besar atau seberapa kecil sebuah perusahaan. biasanya, perusahaan besar diawasi oleh investor, pengawas modal dan pemerintah, sehingga perusahaan cenderung menyelesaikan proses audit laporan keuangan lebih cepat untuk meminimalkan adanya *Audit Report Lag* (Lisdara, Budianto, & Mulyadi, 2019). Ukuran perusahaan yang relatif besar menunjukkan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah terkait keterlambatan laporan keuangan yang dalam penelitian ini disebut *Audit Report Lag* dengan syarat bahwa perusahaan yang besar memiliki sistem pengendalian yang baik sehingga dapat mengatasi berbagai masalah saat melakukan proses audit. Dan sebaliknya, perusahaan kecil kurang memiliki sistem pengendalian sehingga seorang auditor perlu melakukan lebih banyak pemeriksaan selama proses audit yang nantinya akan memperlambat dalam pembuatan laporan keuangan yang sudah diaudit. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan *Audit Report Lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang didukung oleh penelitian sebelumnya oleh (Hassan, 2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

2.3.1.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Audit Report Lag*

Umur perusahaan merupakan salah satu aspek yang dilihat oleh beberapa pihak, umur perusahaan digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam perusahaan untuk memberikan sinyal atau isyarat agar tujuan atau keinginan tercapai. Pihak manajemen akan memberikan informasi jika perusahaan sudah berdiri lama dan menunjukkan daya saing yang nantinya akan memberikan indikasi yang baik kepada pemegang saham yang tentunya akan meningkatkan nilai saham

perusahaan. Dengan begitu pemegang saham, umur perusahaan akan menjadi sinyal tersendiri yang akan meningkatkan kepercayaan pada perusahaan tersebut karena dapat eksis dijangka waktu yang lama.

(Nurdianti, Kartikasari, & Ani, 2020) berpendapat bahwa umur perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Report Lag* dengan begitu dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif, umur perusahaan ini menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan berdiri akan semakin baik proses *Audit Report Lag* nya atau dengan kata lain perusahaan yang besar akan mencari auditor yang baik dan profesional dalam mengerjakan laporan keuangannya sehingga perusahaan akan tetap menjaga nama baiknya dengan memperhitungkan langkahnya dalam mencari dan menyelesaikan *Audit Report Lag* tepat waktu. umur perusahaan merupakan ukuran seberapa lama perusahaan telah beroperasi. Perusahaan yang sudah lama listing dinilai lebih mampu dan berpengalaman dalam mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan selama audit sehingga auditor tidak perlu menghabiskan waktu lama dalam proses audit. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ariani, 2018) menunjukan jika umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

2.3.1.3 Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Komite audit memainkan peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan disiapkan oleh komite dan bertanggung jawab atas melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit adalah pihak yang secara independen mengawasi pelaksanaan suatu proses audit yang dilakukan di dalam perusahaan. Dalam teori keagenan komite audit bertindak sebagai perantara antara principal sebagai pemberi tugas dengan agent selaku penerima tugas dari principal agar konflik keagenan semakin kecil mungkin terjadi.

Adapun komite audit wajib berdiri setidaknya tiga dalam perusahaan. Dengan bertambahnya jumlah komite audit, semakin banyak kontinuitas audit akan dipantau sampai laporan keuangan yang diaudit diterbitkan dengan benar atau kemungkinan terjadinya *Audit Report Lag* akan semakin kecil. Penelitian yang dilakukan oleh (Wandrianto, Anugerah, & Nurmayanti, 2021) menemukan bahwa keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *Audit Report Lag* sementara gender komite audit belum dapat berkontribusi untuk memengaruhi *Audit Report Lag* dalam penelitian ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budi chandra dan Kellin (2020) penelitian menyimpulkan ukuran komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif, sedangkan opini audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh (Ratnasari & Ardianti, 2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik komite audit dan prediksi kebangkrutan berpengaruh pada *Audit Report Lag* tetapi kepemilikan publik tidak berpengaruh pada *Audit Report Lag*.

2.3.1.4 Pengaruh Afiliasi KAP terhadap *Audit Report Lag*

Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu suatu organisasi yang memperoleh izin sesuai dengan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa dalam prakter akuntan publik (Sugiman, 2016). Kantor Akuntan Puublik (KAP) merupakan pihak penyedia jasa layanan audit. Teori kegenan menjadi landasan dalam Afiliasi KAP selaku pihak penyedia jasa audit yang nantinya akan memeriksa hasil pekerjaan dari manajemen dalam bentuk laporan keuangan dalam rangka mencegah kesalahan yang dapat merugikan pemegang saham.

Di Indonesia KAP diperbolehkan menjalin kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik atau organisasi Audit Asing yang telah terdaftar dan diberikan isin oleh Menteri Keuangan. Apabila suatu KAP berafiliasi dengan *Big-Four* makan tuntutan untuk melakukan audit secara benar akan semakin ditekankan dan KAP yang mewakilkan auditornya akan berupaya untuk menyelesaikan tugas audit yang diberikan dalam waktu

yang tepat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nufita, 2017) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara afiliasi KAP terhadap *Audit Report Lag* sejalan dengan penelitian (Lisdara, Budianto, & Mulyadi, 2019).

2.3.1.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Komite Audit, Afiliasi KAP terhadap *Audit Report Lag*

Karena sistem kontrolnya yang kuat, bisnis besar lebih mudah untuk diaudit dan diperbaiki ketika ada masalah, memungkinkan auditor untuk meninjau lebih sedikit sampel dan menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat sambil tetap menyajikan laporan keuangan secara akurat. Usia perusahaan adalah pertimbangan penting lainnya karena mengungkapkan kematangan perusahaan. Perusahaan yang sudah lama berdiri akan memiliki lebih banyak keahlian dalam menangani proses audit, yang akan mengurangi kemungkinan laporan audit akan terlambat. Perusahaan tidak dapat memisahkan tugas komite audit selama proses audit.

Proses audit akan dibuat lebih mudah untuk dijalankan oleh pengawasan dan dukungan komite audit. Karena ada lebih banyak komite audit di perusahaan besar, proses audit akan lebih kecil kemungkinannya untuk menghadapi masalah dan kesalahan, yang akan mempersingkat periode audit dan memungkinkan rilis laporan keuangan yang diaudit tepat waktu. Selain itu, KAP yang berafiliasi dengan Big Four dianggap lebih cepat dalam menyelesaikan proses audit dan menyusun laporan keuangan yang telah diaudit karena memiliki kewajiban yang lebih besar untuk menjaga reputasinya sebagai Big Four sehingga terjadinya *Audit Report Lag* akan lebih kecil kemungkinannya terjadi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, komite audit dan afiliasi KAP terhadap *Audit Report Lag*.

2.3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

H2 : Umur Perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

H3 : Komite Audit parsial berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

H4 : Afiliasi KAP parsial berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

H5 : Ukuran perusahaan, umur perusahaan, komite audit dan afiliasi KAP secara simultan berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.